

## **BAB 5**

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **5.1 Kesimpulan**

Diplomasi pertahanan yang dilakukan antara Indonesia dengan Filipina dalam masalah keamanan di perbatasan secara teoritis memiliki banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga membutuhkan kajian untuk bisa menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukannya ataupun perkembangannya, selain itu perlu juga diketahui bagaimana pemerintah menanggapi berbagai macam indikator dalam keberhasilan kerjasama tersebut.

Hasil utama yang didapatkan dalam penelitian ini adalah kerjasama pertahanan kedua negara dipegaruhi oleh beberapa norma yang mereka yakini dan adanya proses sosialisasi untuk menciptakan identitas baru, sedangkan dilihat juga bagaimana pemerintah menanggapi adanya perbedaan dalam prinsip tersebut dan pengaruhnya bagi keberhasilan kerjasama antara kedua negara dalam masalah keamanan di perbatasan.

##### **5.1.1 Berbagai Faktor yang Mempengaruhi kerjasama antara Indonesia dengan Filipina dalam masalah keamanan di perbatasan**

Penelitian tentang norma, sosialisasi, dan identitas yang menjadi faktor yang menentukan kebijakan kerjasama antara negara Indonesia dengan Filipina telah menghasilkan beberapa kesimpulan, kesimpulan terbagi dalam lima poin; pertama, adanya prinsip dari masing-masing negara yang menjadi pedoman bagi kedua negara; kedua, penjelasan tentang prinsip non-intervensi dari ASEAN, Indonesia, dan Filipina; ketiga, adanya perkembangan dalam proses sosialisasi dan institusionalisasi.

Pertama, prinsip dari masing-masing negara yang menjadi pedoman bagi mereka. Dalam hal ini dapat terlihat perbedaan yang dianut oleh kedua

negara, jika Indonesia dengan jelas menyatakan prinsip 'bebas aktif'-nya dengan maksud memiliki politik luar negeri yang merdeka sekaligus bermaksud terbebas dari segala bentuk blok kekuatan militer atau aliansi pertahanan. Sebaliknya Filipina yang meskipun negaranya memiliki prinsip 'politik luar negeri yang independen' tetapi negaranya tidak sepenuhnya independen karena terikat pada aliansinya dengan negara Amerika Serikat, yang mana keterikatan tersebut menyeret negaranya untuk ikut berperang membantu AS di medan pertempuran di berbagai negara.

Kedua, mengenai prinsip non-intervensi yang dimiliki oleh ASEAN dan dijunjung tinggi oleh Indonesia dan juga Filipina, bukanlah bermaksud bahwa negara-negara ASEAN akan tinggal diam ketika suatu krisis terjadi pada negara anggotanya, ASEAN dan juga negara-negara akan berusaha untuk membantu penyelesaian krisis yang terjadi melalui cara-cara bantuan kemanusiaan ataupun cara lain jika sudah mendapat persetujuan dari negara-negara yang terlibat. Dalam hal ini Indonesia meskipun tidak terlibat secara langsung dalam krisis yang terjadi di Marawi, Indonesia tetap melakukan kerjasama dalam masalah penanggulangan terorisme, pencegahan pembajakan, pertukaran informasi intelijen, dan melakukan patroli terkoordinasi dengan Filipina.

Ketiga, adanya identitas nasionalisme yang kuat memerlukan suatu gagasan yang dapat menanggulangi hambatan nasionalisme yang bersifat terlalu protektif, oleh karena itu diperlukan proses sosialisasi dan institusionalisasi. Saat ini proses sosialisasi terjadi pada level bilateral antara kedua negara; level trilateral atau sub regional dalam kerjasama Malphindo untuk keamanan maritim dan penanganan terorisme; juga pada level regional dalam beragam institusi keamanan yang berada dibawah ASEAN. Adanya proses sosialisasi akan meningkatkan perasaan akan identitas bersama, kesadaran akan ancaman bersama dan perlunya kesejahteraan bersama.

### **5.1.2 Langkah Pemerintah Indonesia menghadapi berbagai kendala dalam masalah keamanan di perbatasan**

Selanjutnya, dalam sebuah kerjasama pertahanan dan keamanan akan dilihat bagaimana tanggapan dari pemerintah Indonesia dalam menghadapi berbagai perbedaan dan kendala dalam menangani krisis di Marawi. Wawancara dengan pejabat pemerintah dan ahli telah mendapatkan beberapa kesimpulan. Pertama, ketetapan bangsa Indonesia untuk tidak melakukan aliansi; kedua, adanya solusi bagi kendala kerjasama penanggulangan terorisme; ketiga, peningkatan proses sosialisasi dan institusionalisasi untuk mengatasi masalah kepercayaan; kelima, alternatif dari tindakan intervensi.

Pertama, masalah tidak bisanya keterlibatan Indonesia pada suatu aliansi merupakan prinsip dasar bagi politik luar negeri Indonesia, hal tersebut juga yang akan mengatur bahwa Indonesia di masa depan juga tidak akan terlibat dalam aliansi.

Kedua, perbedaan dalam metode penanggulangan terorisme yang dimiliki oleh kedua negara seperti Indonesia yang menggunakan polisi sedangkan Filipina dengan militernya, dapat ditengahi dengan adanya lembaga pusat terorisme dari masing-masing negara seperti Indonesia dengan adanya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan di Filipina dengan National Counter Terrorism Action Group, lembaga tersebut yang akan menjembatani kerjasama bagi kedua negara.

Ketiga, kendala seperti belum kuatnya kepercayaan antara kedua negara diharapkan dapat ditangani dengan semakin seringnya pertemuan dilakukan antara kedua negara dalam berbagai forum, kerjasama Malphindo termasuk salahsatu forum yang dibuat untuk mengurus masalah krisis terhadap perompakan dan terorisme bagi Indonesia dan Filipina.

Keempat, terkait prinsip non intervensi perlu mempertimbangkan berbagai hal, terlebih jika mengharapkan adanya pengiriman operasi militer. Kerjasama seperti itu prosesnya akan lama bahkan tidak mudah karena akan

banyak mempertimbangkan dampak baik dan buruk yang akan terjadi pada kedua negara. Dalam masalah bantuan asing Filipina juga sudah menjalin kerjasama aliansi dengan AS. Jika Indonesia ingin melakukan bantuan salahsatu yang paling memungkinkan adalah berada dibawah organisasi internasional seperti UN *Peacekeeping Force*. Atau mungkin Indonesia juga bisa terlibat dalam bentuk bantuan lain seperti bantuan kemanusiaan jika Indonesia merasa butuh melakukan hal tersebut.

Kerjasama keamanan dalam bentuk patroli telah memunculkan kegiatan patroli udara di suatu negara dengan pelibatan personil negara lain dalam operasi. Hal tersebut dapat mengatasi masalah kecemasan akan kedaulatan wilayah, pelanggaran batas, dan tindakan over protektif terhadap negara lain.

Dari kedua pertanyaan dan jawaban yang telah diberikan dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah Indonesia tetap memegang teguh norma yang dipegangnya berikut juga dengan pemerintah Filipina, kerjasama berjalan pada norma-norma yang saling sesuai antara kedua pihak. sedangkan untuk menghadapi kendala yang terjadi pada saat ini ataupun di masa depan, dilakukan dengan terus meningkatkan kerjasama pada level bilateral, sub regional dan juga regional secara intensitas dan jumlah institusi.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Saran Teoritis**

Konsep dan Teori yang dijadikan sebagai alat analisis dalam penelitian ini telah memberikan penjelasan bagi peneliti dalam memahami kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Filipina secara sistematis dan komprehensif. Berdasarkan keseluruhan proses penelitian ini dapat dimunculkan saran teoritis yaitu: Konsep kerjasama pertahanan internasional oleh Dick Zandee memiliki indikator keberhasilan yang lebih cocok digunakan untuk menganalisis kerjasama pertahanan yang bersifat aliansi, meskipun begitu penelitian ini mencoba mengadaptasi beberapa indikator yang dirasa

cocok untuk bentuk kerjasama diluar bentuk aliansi. Di masa depan diharapkan ada konsep ataupun teori yang lebih cocok untuk menganalisis kerjasama pertahanan dan keamanan bagi negara-negara di Asia Tenggara ataupun di kawasan lain yang tidak berbentuk sebagai aliansi pertahanan.

### **5.2.2 Saran Praktis**

Penelitian ini juga berusaha memberikan masukan praktis bagi lembaga pemerintah, institusi yang terlibat dalam menangani masalah kerjasama internasional dengan negara-negara di Asia Tenggara, dan juga bagi penelitian selanjutnya

- Indonesia perlu mempertahankan kebijakan non intervensinya dan juga non aliansinya karena tertuang dalam UU hubungan luar negeri, dan harapan dari pendiri bangsa di masa lalu.
- Indonesia harus menjaga keaktifannya dalam menanggapi berbagai isu, terutama jika terjadi krisis di negara tetangga dan dapat menimbulkan pengaruh keamanan bagi kondisi keamanan dalam negeri. Keaktifan tersebut perlu ditunjukkan dengan kesiapannya menawarkan bantuan kemanusiaan bagi negara yang mengalami krisis.
- Indonesia perlu perlu terus menjadi negara yang terdepan dalam mendukung terbentuknya ASEAN Peacekeeping Force. Untuk mendukung itu Indonesia juga perlu mencapai targetnya untuk menjadi pengirim pasukan perdamaian terbesar di pasukan *peacekeeping* PBB.
- Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memunculkan narasumber dari pihak Filipina sekaligus menambahkan narasumber Indonesia dari pihak Militer untuk lebih memperkaya dalam memberikan berbagai perspektif dan gambaran pada yang terjadi.